



KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NOMOR 121/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XI/2025

TENTANG

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;

b. bahwa pelaksanaan program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu dibentuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan...

- Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;
 10. Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035 .
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/ SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
 14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 916//DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
 16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM.1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri;

17. International Framework for Court Excellence/IFCE;
18. ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit;
19. ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
20. ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 100/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/IX/2025 tanggal 19 September 2025, Tentang Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Negeri Simalungun;

KEDUA : Membentuk kembali dan menunjuk yang nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun.

KETIGA : Predikat sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) terdiri atas :

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup.

KEEMPAT : Pelaksanaan program sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) mengacu pada :

1. Pedoman sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Lembar Asesmen sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);

KELIMA...

KELIMA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Simalungun yang ditunjuk sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dalam menjalankan tugasnya senantiasa selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Simalungun
Pada tanggal 10 November 2025

KETUA
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
Nomor : 121/KPN.W2-U16/SK.OT1.6/XI/2025
Tanggal : 10 November 2025

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Erika Sari Emsah Ginting, S.H, M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun	Ketua Tim
Tim Asesmen Internal			
1	Rumia Rotua Anne Christina Lumbanraja, S.H., M.H.	Hakim	Lead Asesor
2	Agung Cory F. D Laia, S.H., M.H.	Hakim	Asesor
3	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Hakim	Asesor
4	Harya Juang Siregar, S.H.	Hakim	Asesor
5	Glory Audina R C Silaban, S.H.	Hakim	Asesor
6	Agnes Monica, S.H.	Hakim	Asesor
7	Satya Frida Lestari, S.H.	Hakim	Asesor
8	Mira Herawaty, S.H.	Hakim	Asesor
9	Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.	Hakim	Asesor
Tim Survei			
1	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panmud Hukum	Koordinator
2	Heni Girlbet Silalahi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim
3	Miseri Domini Purba, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim
4	Elma Freshly Simanjuntak, A.Md	Arsiparis Pelaksana	Anggota Tim
5	Yosi Halmahera Sipayung, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim
6	Artha Sri Rosari Saragih, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Tim
7	Rimbun Rimmauli Avu Pasaribu, S.H.	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota Tim
8	Ida Besluita Silalahi, S.T	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota Tim
9	Fernando Y Hutasoit	Operator Layanan Operasional	Anggota Tim

Tim Pengendali Dokumen			
1	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Sekretaris	Koordinator
2	Parlin Halomoan Harahap S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
3	Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Penanggungjawab di Bidang Kepaniteraan
4	Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.	Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab di Bidang Kepaniteraan
5	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab di Bidang Kepaniteraan
6	Soraya Rizna Afrijal, S.H.	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penanggungjawab di Bidang Kesekretariatan
7	Mona I Lumbansiantar, S.E	Kasub Bag Perencanaan TI dan Pelaporan	Penanggungjawab di Bidang Kesekretariatan
8	Luky A Sebayang, S.Kom	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab di Bidang Kesekretariatan
9	Nova Carolina Ginting, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota Bidang Kesekretariatan
10	Frenky A Tampubolon, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	Anggota Bidang Kesekretariatan
11	Ardila Winarti, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Bidang Kesekretariatan
12	Artha Sri Rosari Saragih, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota bidang Kepaniteraan
13	Heni Girlbet Silalahi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota bidang Kepaniteraan
14	Yosi Halmahera Sipayung, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota bidang Kepaniteraan

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

-Ttd-

ERIKA SARI EMSAH GINTING

